Program Prioritas & Outlook 2023
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Rohmat Mulyana Sapdi
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

Hari Amal Bhakti
Kementerian Agama
Republik Indonesia

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS 2022

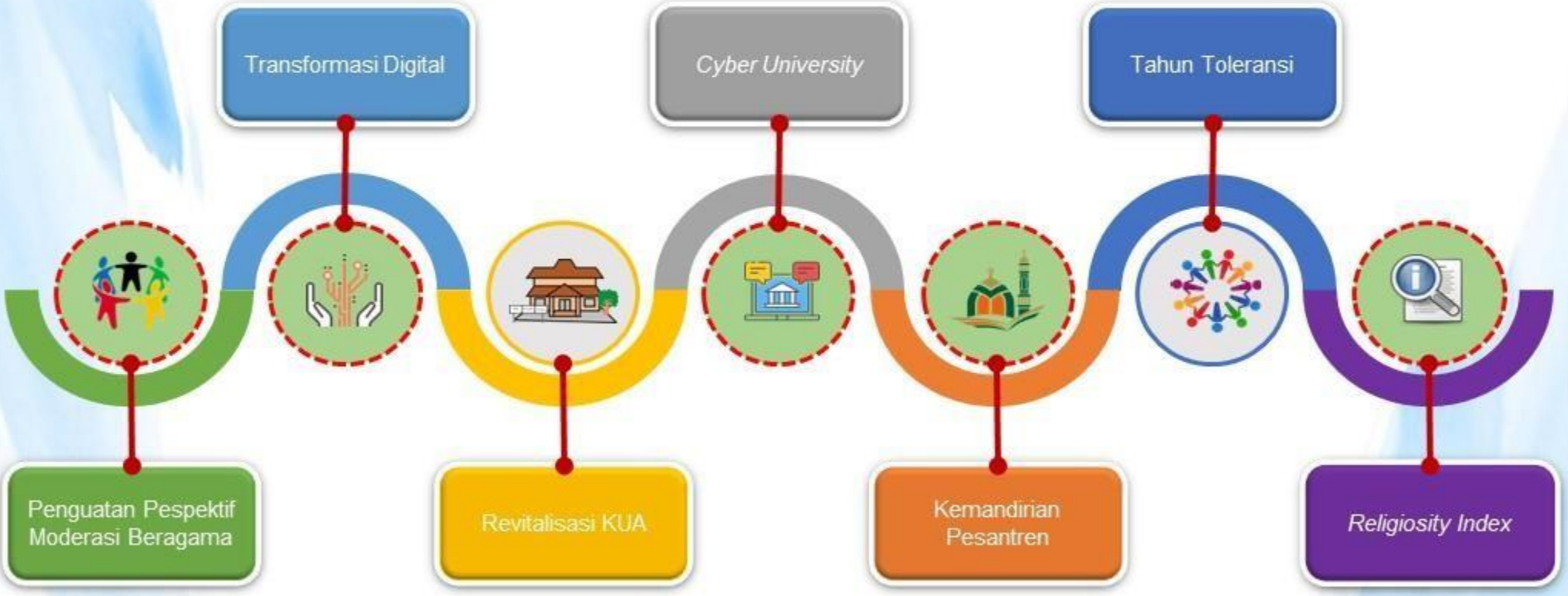

RAKERNAS 2023 KEMENTERIAN AGAMA RI

Integrasi Moderasi Beragama bagi Guru RA/ Madrasah

Salah satu poin mendasar untuk merawat keberagaman dalam bingkai persatuan adalah integrasi moderasi beragama pada mata pelajaran sehingga madrasah dapat menguatkan proses pemahaman dan sekaligus pengamalan ajaran agama secara adil dan seimbang (proporsional). Dengan demikian diharapkan akan dapat mencegah perilaku menyimpang yang justru keluar dari ajaran agama itu sendiri.

100.000
Guru madrasah

Pelatihan Moderasi Beragama

700
Pengawas madrasah

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Moderasi Beragama (MB) menjadi salah satu program prioritas di Kementerian Agama RI. Diseminasi Moderasi Beragama di Direktorat PAI dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, Insersi, Implementasi dan Kolaborasi.

Launching Griya Moderasi Beragama
9 Perguruan Tinggi Mitra

Insersi Materi MB pada Modul PPKB GPAI
6 Modul PPKB GPAI

Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar
24 Buku Teks PAI BP bagi Guru dan Siswa

***Mainstreaming* Moderasi Beragama**

Lembaga Mitra
2.000 GPAI

Mahasiswa PTU
400 Mahasiswa

Siswa Sekolah
2.000 Mahasiswa

Riset Moderasi Beragama
20 Dosen PAI
Rp200.000.000

2 Transformasi Digital

MADRASAH REFORM

EMIS

Gerbang Data Pendidikan Kementerian Agama (EMIS V 4.0)

- e-RKAM — Rencana Kerja Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik (e-ERKAM V 2.0)
- BOS KEMENAG — Sistem Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Madrasah (BOS V 1.0)
- ijop — Aplikasi Ijin Operasional RA dan Madrasah Swasta
- — Madrasah Resource Center (MRC), platform komunitas pembelajar virtual
- — Madrasah Digital Care

SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama)

SISFODEMA (Aplikasi Layanan Bantuan Penelitian Moderasi Beragama untuk Dosen dan Mahasiswa PTU)

SPACE (Sistem pembelajaran elektronik untuk PPG, kerjasama dengan Google for education)

SILABA-PAI (Sistem Informasi Layanan Bantuan PAI)

LINTAS DAI (untuk para dosen agama Islam)

CENDIKIA (Portal penyedia modul dan bahan ajar PAI)

3 Cyber University

CYBER ISLAMIC UNIVERSITY

2.000 Guru

Beasiswa PJJ PAI bagi Guru Madrasah

4

Kemandirian Pesantren

2021

Pesantrenpreneur

- Launching Pesantren Preneur
- Dashboard Data Ekonomi Pesantren
- Pilot Program 100 Pesantren

2022

BUMPes & Santripreneur

- Launching 100 BUM-Pes
- Launching Gerakan Santripreneur
- Launching Platform Digital Ekonomi Pesantren
- Replikasi 500 Pesantren

5 Religiosity Index

Instrumen

Penyusunan Instrumen Religiosity Index

Pemetaan

Penelitian Pemetaan Religiosity Index

RAKERNAS 2023 KEMENTERIAN AGAMA RI

Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Republik Indonesia

OUTLOOK 2023

2

ANALISIS KONDISI OBJEKTIF

Indonesia

2045

Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur

Islamic Learning Framework

(Modification of The OECD Learning Framework 2030)

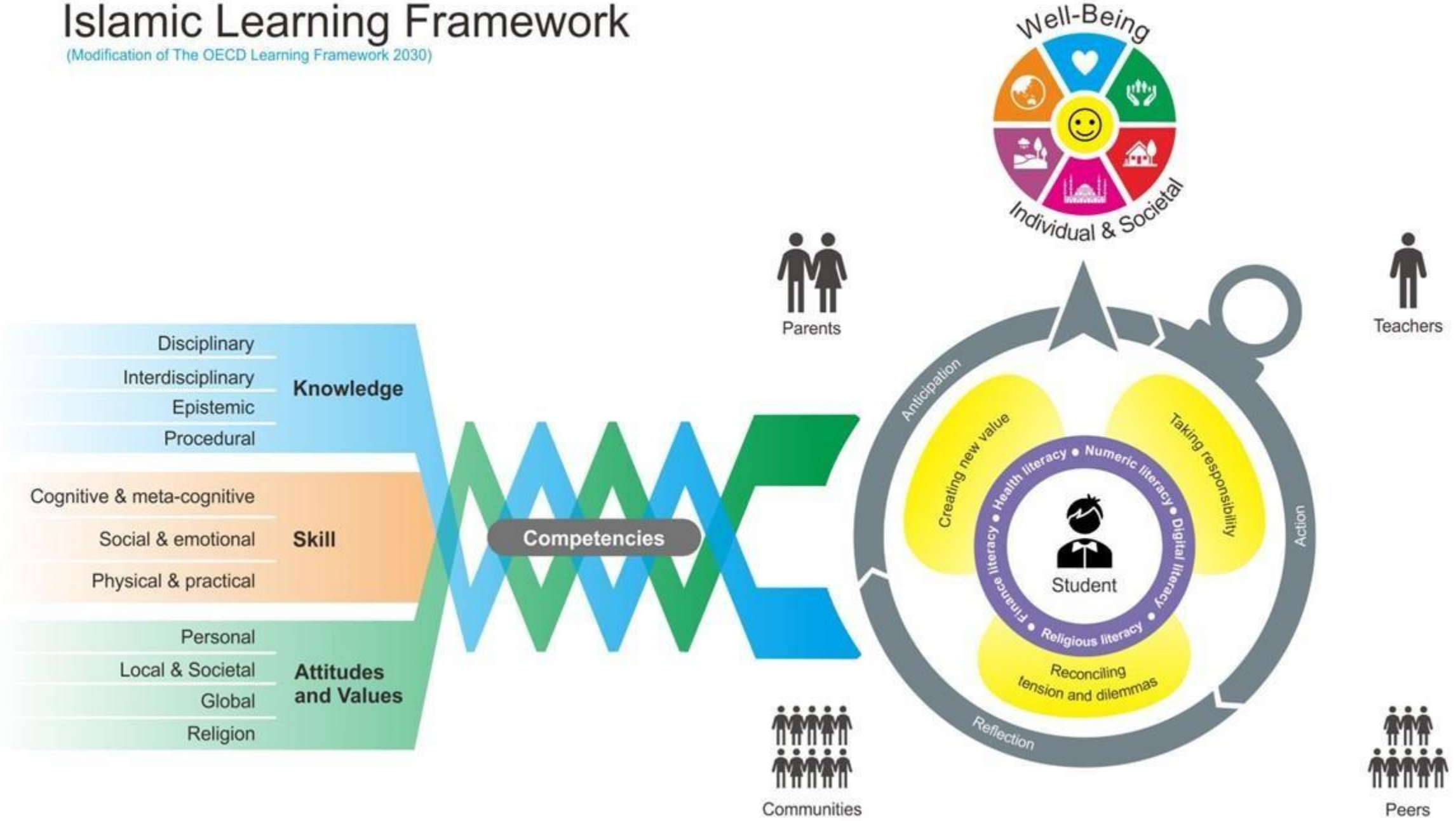

1 Pemerataan Layanan Pendidikan Agama Islam Berkualitas

Kekuatan

- Madrasah dan PTKI menjadi pilihan sebagian orang tua.
- Pendidikan berciri khas Islam dan Pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin.
- Jumlah satuan Pendidikan cukup banyak dan tersebar sampai ke pelosok Tanah Air (3T).
- Sistem pengelolaan tersentralisasi memudahkan alih sumberdaya dalam rangka pemerataan mutu

Peluang

- Pemerintah menjamin akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP.
- Berbagai opsi untuk meningkatkan akses
- Berkembangnya informasi dan *big data* dapat diakses terbuka untuk bahan pembelajaran.
- Berkembangnya sistem pembelajaran daring dapat dimanfaatkan untuk akselerasi akses.
- Antusiasme masyarakat tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

Kelemahan

- APK sekolah menengah masih rendah (88,55%), PT 33,37%.
- Akses ke PAUD untuk kesiapan belajar baru 34,36%.
- Munculnya lembaga Pendidikan baru (swasta) yang mutunya tidak terjamin.
- Kesenjangan mutu Pendidikan antar daerah dan antara negeri dan swasta masih tinggi.
- ATS mencapai 4,4 juta anak usia sekolah.
- Capaian akreditasi kelembagaan Madrasah dan PTKI masih rendah.

Tantangan

- Akses Pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM
- Penempatan/ proporsi anak usia sekolah meningkat dalam struktur penduduk lima tahun ke depan
- Pemerataan Pendidikan yang berkualitas model dasar untuk pemerataan ekonomi.
- Tidak meratanya akses Pendidikan berkualitas dapat menjadi pemicu konflik sosial

Isu Strategis:

Peningkatan akses pendidikan Islam yang berkualitas dengan menjaring ATS, menambah ruang kelas, mengendalikan ijin, dan meningkatkan akreditasi.

2 Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran

Kekuatan

- Penerapan kurikulum 2013 dan melaksanakan pilot project implementasi Kurikulum Merdeka merintis dilaksanakan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir.
- Pengintegrasian kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam soal-soal AN, telah mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir
- Walaupun belum sempurna, buku-buku pelajaran sudah disusun dengan pendekatan discovery learning.

Peluang

- Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan bepikir dapat diterapkan tanpa merubah kurikulum yang berlaku.
- Meningkatkan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan.
- Meningkatnya kemampuan berpikir memberikan kontribusi dalam meningkatkan penghasilan.

Kelemahan

- Kurikulum 2013 belum berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun)
- Hasil tes PISA menunjukkan kemampuan berpikir siswa pada Matematika, IPA, dan Bahasa sangat rendah.
- Hasil AKMI menunjukkan hasil yang lebih rendah.
- Metode pembelajaran masih fokus pada tingkat menghafal dan memahami tingkat rendah.

Tantangan

- Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak dikembangkan akan sangat mempengaruhi kualitas angkatan kerja.
- Apabila kemampuan seperti ini tidak dibina sejak tingkat sekolah dasar, maka ini akan mempengaruhi hasil belajar pada tingkat yang lebih tinggi.

Isu Strategis:

Peningkatan metode pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk meningkatkan pola pikir, dan dimulai sejak pendidikan usia dini.

4 Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam

Kekuatan

- Tersedia landasan hukum pelaksanaan Pendidikan keagamaan Islam dan Pesantren.
- Afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi Pemerintah terhadap Pesantren
- Menjadi bagian dan berperanan dalam penuntasan program Pendidikan Wajib 12 Tahun.
- 31% Program Pendidikan Kesetaraan memperoleh predikat akreditasi "A"
- Memiliki kelembagaan Majelis Masyayikh sebagai pengendali mutu program

Peluang

- Tersedianya Program Pendidikan Kesetaraan yang fleksibel (sesuai dengan kebutuhan peserta didik)
- Apabila dibina dengan baik, Program Pendidikan Kesetaraan dapat menjadi katub pengaman bagi ATS memperoleh akses pendidikan.
- Antusiasme sebagian orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada Pendidikan keagamaan Islam masih tinggi.
- Apabila kualitas Pendidikan keagamaan Islam dilengkapi dengan pelajaran umum yang cukup, akan menghasilkan lulusan yang kompetitif.

Kelemahan

- Jumlah peserta didik dan lembaga Pendidikan keagamaan Islam jalur formal masih sangat terbatas.
- Kualifikasi tenaga Pendidikan dan kependidikan lainnya masih rendah.
- Sebagian besar sarana dan prasarananya belum memenuhi standar.
- Sistem manajemen kelembagaannya masih banyak yang tradisional.
- Masih lemahnya system standarisasi kelembagaan.

Tantangan

- Apabila akses Pendidikan keagamaan Islam tidak ditingkatkan, kelangkaan ahli agama Islam akan terjadi.
- Apabila mutu kedalaman ilmu Keagamaan Islam rendah, maka dapat tumbuh benih radikalisme.
- Meningkatnya faham radikalisme dapat mengancam keberadaan lembaga Pendidikan keagamaan Islam.

Isu Strategis:

Peningkatan akses Pendidikan Keagamaan Islam berkualitas, dalam rangka menyiapkan ahli Agama Islam yang kompeten.

5 Penguatan Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam

Kekuatan

- Moderasi beragama merupakan modal dasar dalam kerukunan bangsa dan mengatasi konflik.
- Sudah diterbitkan buku pedoman dan rambu-rambu implementasi moderasi beragama.
- Telah dilakukan rintisan pengarusutamaan moderasi beragama.
- Tersedia 170 instruktur nasional.
- Telah dirintis pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Agama yang berwawasan nilai budaya Damai

Peluang

- Akses memperoleh Pendidikan Agama Islam dijamin undang-undang.
- Dukungan lembaga keagamaan dan media terhadap Pendidikan Agama Islam yang moderat tinggi.
- Ditemukan beberapa praktik baik moderasi beragama dari kearifan lokal yang dapat diadopsi.
- Jumlah jam pembelajaran PAI ditingkatkan menjadi 3 jam per minggu.

Kelemahan

- Moderasi beragama belum sampai pada tahap implementasi.
- Belum tersedianya paket pelatihan terstandar .
- Indeks kerukunan umat yang dicapai masih fluktuatif .
- Belum jelasnya status pengelolaan dan konten moderasi beragama pada Pendidikan Agama Islam
- Diversifikasi pengelolaan konten moderasi beragama pada guru Agama Islam.
- Berkembangnya paham radikalisme di kalangan mahasiswa dan siswa.

Tantangan

- Moderasi beragama strategis untuk mengukuhkan toleransi dan kerukunan dalam kebhinekaan.
- Indonesia yang plural dan multikultural berpotensi terjadinya konflik.
- Konflik sosial dan politik dapat menjadi konflik agama.
- Gerakan faham radikal sudah mempengaruhi pandangan peserta didik, yang bisa berdampak kepada timbulnya konflik.

Isu Strategis:

Menjadikan Pendidikan Agama Islam pada PAUD sampai perguruan tinggi menjadi instrumen untuk memperkuat moderasi beragama

6 Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Kekuatan

- Jaminan kesejahteran tenaga Pendidik telah dikukuhkan dengan UU.
- Guru masih menjadi sumber belajar utama yang paling berpengaruh terhadap kompetensi lulusan.
- Masih adanya LPTK yang secara khusus dirancang mempersiapkan calon guru.
- Tersedianya data guru real time.
- Adanya PKB, sistem yang menjamin peningkatan kompetensi guru berkelanjutan

Peluang

- Proporsi yang akan pensiun lima tahun mendatang cukup besar, kesempatan mengangkat guru yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi serta mengatur pemerataan penempatannya dapat dilakukan.
- LPTK bersedia untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
- Dibukanya opsi mengangkat guru tetap non-PNS (PPPK).
- Peraturan perundangan mendorong manajemen guru PAI oleh Kementerian Agama

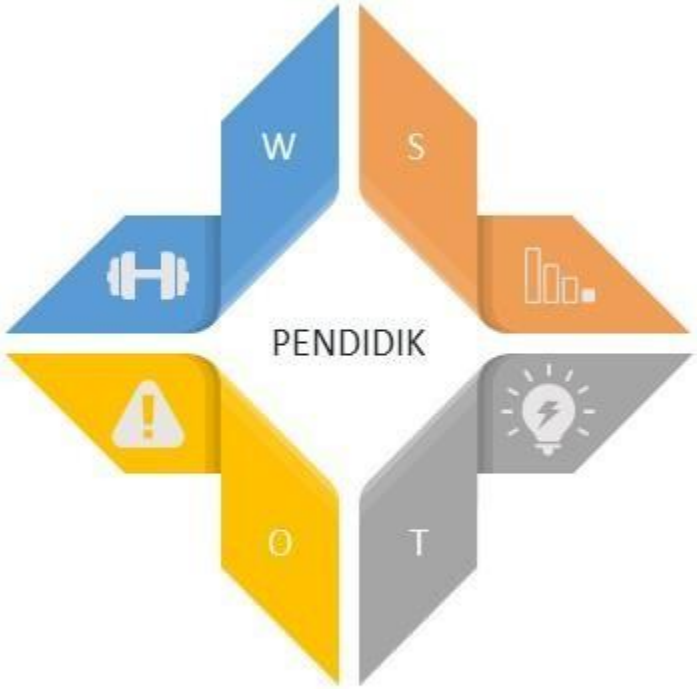

Kelemahan

- Masih besar proporsi guru/ dosen/ ustadz yang belum memenuhi kompetensi minimal (belum bersertifikasi).
- Terbatasnya jumlah LPTK yang mampu menyelenggarakan PPG.
- Sebaran penempatan guru belum merata.
- PKB belum dilaksananakan secara nasional.
- Manajemen guru dan dosen PAI belum jelas.
- LPTK belum menghasilkan guru yang memiliki profesionalisme dan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan standar.

Tantangan

- Tanpa akselerasi peningkatan kompetensi guru, dapat berakibat proses pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan oleh banyak guru yang tidak berkompeten, yang dapat berakibat kepada rendahnya mutu lulusan.
- Apabila jumlah guru yang diangkat tidak seimbang dengan yang pensiun, maka akan terjadi kekurangan guru secara masal.

Isu Strategis:

Kepastian pemenuhan jumlah guru yang memadai dan berkompetensi, pemerataan penempatan, pengelolaan guru agama, dan revitalisasi LPTK.

7 Kualitas Penjaminan Pendidikan

Kekuatan

- Landasan hukum untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal sudah tersedia
- Sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi oleh BAN-SM sudah berjalan.
- e-EDM dan e-RKAM mendukung pengelolaan program peningkatan mutu madrasah

Peluang

- Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal lebih menjamin peningkatan mutu berkelanjutan.
- Satuan pendidikan yang memiliki nilai akreditasi tinggi berpeluang untuk mendapat input (calon siswa) yang unggul
- Madrasah yang memperoleh nilai akreditasi tinggi lebih berpeluang dalam memperoleh dukungan sumber daya dari pemerintah dan masyarakat.
- Akreditasi memberikan gambaran mengenai tingkat capaian dalam pemenuhan standar, sehingga mempermudah madrasah dalam merencanakan peningkatan mutu

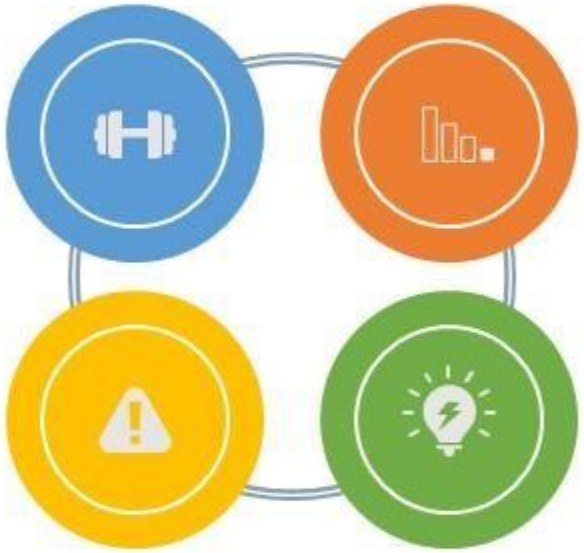

Kelemahan

- Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh predikat akreditasi A masih rendah.
- Kapasitas BAN-SM/ PT untuk melakukan visitasi satuan pendidikan terbatas.
- Masih minimnya pemahaman terhadap sistem penjaminan mutu eksternal bagi sebagian satuan pendidikan keagamaan Islam.
- Belum meratanya pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan.
- Belum adanya sistem kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pembinaan sistem penjaminan mutu internal tingkat satuan pendidikan

Tantangan

- Masyarakat memilih madrasah berdasarkan tingkat akreditasi
- sebagai salah satu kriteria
- Peringkat akreditasi satuan pendidikan/ madrasah dikaitkan dengan kriteria untuk memperoleh bantuan anggaran dari pemerintah.

Isu Strategis:

Pemenuhan Standar Pendidikan Nasional; peningkatan kualitas dan manajemen penjaminan mutu Pendidikan Islam yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan; serta peningkatan dan pemerataan kualitas dan kompetensi pendidik.

8 Kualitas Mental/ Karakter Siswa

Kekuatan

- Kementerian Agama mengintegrasikan program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (P2RA) sebagai karakter utama dalam muatan kurikulum
- Lembaga pendidikan di Kemenag telah biasa mengajarkan Pendidikan karakter berbasis keagamaan, seperti akhlaqul karimah pada Pendidikan Islam.

Peluang

- Dukungan orang tua dan masyarakat tinggi sehingga memudahkan dalam pelibatan mereka untuk pendidikan karakter yang optimal
- Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam semua pembelajaran, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler
- Pada sebagian satuan pendidikan di Kementerian Agama dilakukan secara berasrama, lingkungan dimana Pendidikan karakter dapat dilakukan lebih intensif termasuk melalui keteladanan.

Kelemahan

- Implementasi kurikulum merdeka, P5 dan P2RA belum dilakukan secara menyeluruh di semua madarasah
- Terbatasnya jumlah guru/ pelatih pendidikan karakter P5 dan P2RA bagi guru/ kepala madrasah/ tenaga kependidikan keagamaan

Tantangan

- Metode pembelajaran untuk meningkatkan profil karakter pelajar dapat diterapkan tanpa merubah kurikulum yang berlaku
- Meningkatkan daya terima pengguna lulusan terhadap alumni satuan pendidikan yang memiliki karakter yang baik
- Kualitas mental dan karakter akan memberikan kontribusi positif kemudahan hidup bagi siswa makanala menjalani kehidupannya.

Isu Strategis:

Integrasi pendidikan karakter ke dalam muatan kurikulum di semua jenis dan jenjang Pendidikan Islam

9 Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kekuatan

- Indeks Reformasi sudah meperoleh nilai 84/100
- Nilai Zone Integritas 80,73/100
- Nilai pelayanan public 78/100
- Dipilih sebagai Pilot Proyek untuk meningkatkan Indeks Zona Integritas.
- Pelaksanaan kinerja zona integritas semakin luas dan audit berbasis resiko sudah mulai dilaksanakan dengan baik

Peluang

- Potensi pemasukan PNBP masih besar, tetapi belum dikelola secara optimal
- Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kemutakhiran data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada
- Melalui pengelolaan big data, dapat dilakukan pengintegrasikan data Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dengan data terkait di luar Kementerian Agama

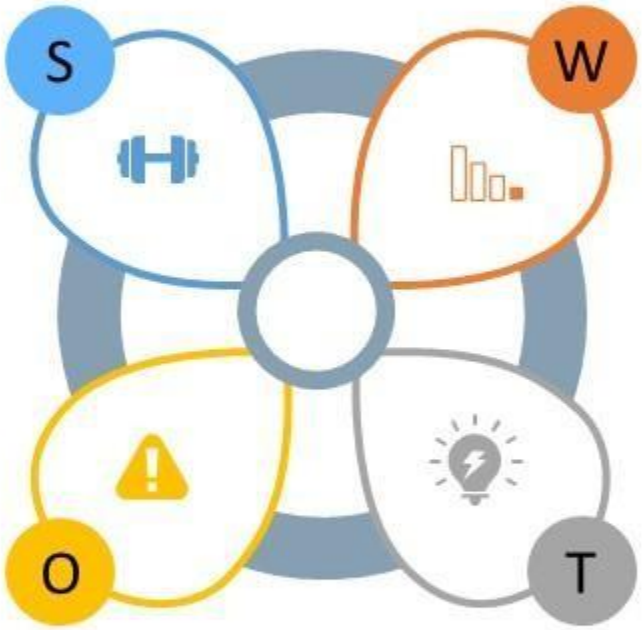

Kelemahan

- Manajemen ASN belum dilakukan dengan baik
- Sistem manajemen aset belum sempurna
- Sistem pendataan masih parsial, *out of date*, dan belum terintegrasi dan dapat dikonsolidasikan
- Belum ada sistem pengendalian dalam perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan berbasis Renstra
- Sistem tata kelola dan prosedur kerja masih lamban
- Penyusunan regulasi lambat dan isinya sering tumpang tindih.

Tantangan

- Karena sentralistik, cakupan pembinaan mencapai ribuan satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi, lingkup pengawasan yang sangat besar.
- Sistem komunikasi organisasi yang masih tradisional menjadi hambatan dalam efektivitas pengendalian organiasi.

Isu Strategis:

Peningkatan tatakelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan fokus pada manajemen ASN, kualitas data, dan percepatan prosedur kerja dengan memanfaatkan TIK.

10 Penguatan Pengarustamaan/ Kesetaraan Gender

Kekuatan

- IPG di Madrasah 1,01-1,07 (> 1,00)
- IPG di PTKI 1,40 (> 1,00).
- Kesetaraan gender di kalangan siswa dan mahasiswa sudah baik dan meningkat.
- Peluang bagi siswa perempuan untuk memperoleh keunggulan di bidang akademik tinggi.

Peluang

- Kebijakan Pemerintah menggunakan pengarusutamaan gender sebagai nilai budaya yang melandasi pembangunan (RPJMN 2020-2024).
- Apabila dikelola dengan baik, kesetaraan gender dapat meningkatkan daya kompetitif yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas.
- Penerapan pengaturusamaan gender dapat mengurangi konflik.

Kelemahan

- Kesetaraan gender di lembaga birokrasi dan pengelolaan satuan Pendidikan masih rendah.
- Ketimpangan gender masih terjadi di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya.
- Data gender di lingkungan birokrasi belum tersedia sepenuhnya.

Tantangan

- Kesetaraan gender tidak hanya menjadi isu nasional tetapi juga isu global.
- Penyimpangan dari kesetaraan gender dapat menimbulkan konflik.

Isu Strategis:

Pengarusutamaan gender di kalangan birokrasi, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk peningkatan produktivitas

RAKERNAS 2023 KEMENTERIAN AGAMA RI

Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Republik Indonesia

OUTLOOK 2023

3

ARAH KEBIJAKAN

ISU STRATEGIS PENDIDIKAN ISLAM

Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Republik Indonesia

1. Aksesibilitas Pendidikan Berkualitas
2. Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing
3. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik
4. Moderasi Beragama

RAKERNAS 2023 KEMENTERIAN AGAMA RI

1
KEBIJAKAN PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN
Pendidikan Kecakapan Hidup
Perluasan Akses Madrasah Terpadu
Perluasan Akses Perguruan Tinggi
Pemanfaatan Teknologi sebagai Sarana Pembelajaran Jarak Jauh
Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perluasan Akses Pendidikan
Pendanaan Biaya Operasional Pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Rekruitmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemberian Beasiswa
Perluasan akses pendidikan pada jalur nonformal
Pengembangan Madrasah Inklusif
Pengembangan Layanan Pendidikan pada wilayah 3T
Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2 KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING
Perluasan dan Peningkatan Mutu Akreditasi oleh BAN-SM, BAN-PT, dan Majelis Masyayikh
Pengembangan Guru sebagai Profesi
Pembinaan & Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal
Pemenuhan Standar Pendidikan Nasional (SNP)
Pengawasan dan Penjaminan Mutu secara Terprogram dengan Mengacu pada SNP
Pengembangan Kelembagaan Pengelola Kebijakan Pesantren (Usulan Ditjen Pesantren)
Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan
Peningkatan Jumlah dan Mutu Publikasi Ilmiah dan HAKI
Penguatan Program Studi Kejuruan, Vokasi, dan Profesi
Transformasi Kelembagaan PTKIN
Pengembangan Madrasah Bertaraf Internasional
Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Perluasan Pendidikan Kecakapan Hidup
Peningkatan Kreativitas, Entrepreneurship, dan Kepemimpinan Mahasiswa
Pengembangan Madrasah Model/ Unggulan

3 KEBIJAKAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN CITRA PUBLIK

- Penataan Regulasi Pengelolaan Pendidikan
- Peningkatan Citra Publik
- Pembentukan satuan pendidikan WBK dan WBBM
- Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Itjen, BPKP, dan BPK
- Pengembangan dan Implementasi Sistem Aplikasi secara Terintegrasi

- Peningkatan Sistem Pengendalian Internal
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Pendidikan
- Penguatan Budaya Kerja
- Penataan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

4 KEBIJAKAN PENGUATAN PRESPEKTIF MODERASI BERAGAMA

- Pengembangan Kelembagaan Pengelola Moderasi Beragama
- Pengembangan Rumah Moderasi Beragama
- Kerjasama Kelembagaan Pengembangan Moderasi Beragama
- Penyusunan Modul Pelatihan dan Buku Pedoman Moderasi Beragama
- Publikasi dan Diseminasi Praktik Moderasi Beragama
- Pembinaan Moderasi Beragama bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Integrasi Moderasi Beragama pada kurikulum pembelajaran
- Pembentukkan Duta Pengukuran Indeks Moderasi Beragama
- Pengawasan dan Penjaminan Mutu Program Moderasi Beragama
- Pengukuran Indeks Moderasi Beragama

RAKERNAS 2023 KEMENTERIAN AGAMA RI

Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Republik Indonesia

OUTLOOK 2023

4

PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT

DIREKTORAT
PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

01 Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi **Peningkatan Mutu** Lembaga, Sarpras, Santri, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Kurikulum

02 **Pengembangan kelembagaan** dengan mendorong terbentuknya Direktorat Jenderal Pesantren

03 Penyelenggaraan Musabaqah Qira'atil Kutub Tingkat Nasional (MQKN) dan Peringatan Hari Santri

04 Penguatan peran Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam pengarusutamaan **Moderasi Beragama**

05 **Penguatan Transformasi Digital** dengan fasilitasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi serta penyediaan layanan digital bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

06 **Alokasi Dana Abadi Pesantren** yang merupakan mandat dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

07 **Program Kemandirian Pesantren** untuk mewujudkan Pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat dengan optimal

DIREKTORAT KSKK MADRASAH

Kualitas
Peningkatan Mutu/ Kualitas Pendidikan

Kelembagaan
Mendorong Penguatan Kelembagaan Melalui Pendirian dan Penegerian Madrasah

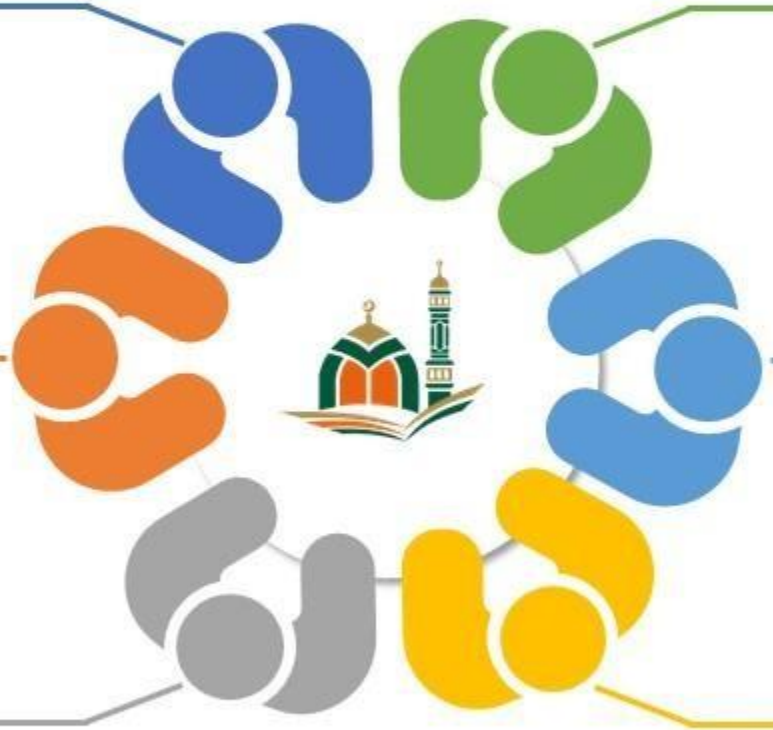

Moderasi Beragama
Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat

Pendidikan Vokasi
Kualitas Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama dengan Dunia Kerja/ Industri

Sistem Penjaminan Mutu
Peningkatan Kualitas Standar dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Revolusi Pembelajaran
Revolusi Pembelajaran Madrasah dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Sumberdaya Manusia Bermutu

DIREKTORAT
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH

DIREKTORAT
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Meningkatnya
Mutu, Guru, Dosen
dan Pengawas PAI

Meningkatnya
Mutu Siswa
PAI

Meningkatnya
Efektifitas
Kurikulum PAI

DIREKTORAT
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

- Transformasi Kelembagaan
- Transformasi Tata Kelola Keuangan
- Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- Penguatan Moderasi Beragama
- Internasionalisasi PTKI
- Implementasi MBKM pada PTKI
- Peningkatan Mutu Sumberdaya Manusia
- Tracer Study Lulusan PTKIN
- Penguatan Cyber Islamic University
- Sindikasi Media

Bidang	Urusan	Capaian
Umum	Urusan ketatausahaan, kerumahtanggan, perlengkapan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara	Pengelolaan perlengkapan serta status penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara
Keuangan	Urusan keuangan	Kualitas layanan administrasi keuangan, serta penyerapan anggaran dan pencapaian *output* belanja
Perencanaan	Urusan koordinasi dan penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran	Keselarasan muatan rencana kerja dengan rencana strategis dan pengalokasian anggaran secara tepat
Organisasi	Urusan organisasi dan tata laksana, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis, dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel, serta penyelesaian temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal
Hukum	Urusan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, penyusunan regulasi, serta advokasi hukum	Pemenuhan kebutuhan dan harmonisasi regulasi serta layanan advokasi hukum
Kepegawaian	Urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karir pegawai	Layanan kepegawaian, nilai indeks profesionalitas (kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan) dan pemenuhan syarat *leveling* kompetensi jabatan ASN
Humas	Urusan koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat	Penyediaan media dan konten publikasi yang komprehensif, valid, reliabel, dan dapat diakses setiap waktu
Data	Urusan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi	Sistem informasi terintegrasi yang mampu menyediakan data yang komprehensif, valid, reliabel, *up-to-date*, terdigitalisasi, dan dapat diakses setiap waktu

PAGU ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 - 2023

Berdasarkan Program

Dalam Ribuan

NO	PROGRAM	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	462.984.725	474.738.974	322.083.390
2	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.025.785.026	1.054.388.771	1.020.490.000
3	Dukungan Manajemen	2.914.286.921	2.932.379.588	60.048.640
JUMLAH		**4.403.056.672**	**4.461.507.333**	**1.402.622.030**

RAKERNAS 2023 KEMENTERIAN AGAMA RI

Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Republik Indonesia

TERIMA KASIH